

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah membawa perubahan yang signifikan di dunia pertanahan Indonesia. UUPA dan seperangkat peraturan pelaksanaannya diharapkan mampu memberikan jaminan hukum bagi para pemegang hak atas tanah. Namun dalam kenyataannya tanah tidak dapat terlepas dari permasalahan, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Cirebon yaitu munculnya sertipikat ganda yang berujung pada sengketa.

Tujuan Penulisan tesis ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya sertipikat ganda di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, bagaimana penyelesaian sengketa atas kepemilikan sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dan bagaimana kendala serta upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon untuk mengatasi sertipikat ganda.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu menggabungkan antara bahan hukum kepustakaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain untuk mendapatkan data sekunder yang kemudian dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di lapangan melalui wawancara untuk mendapatkan data primer.

Dari penelitian tersebut diperoleh jawaban bahwa Munculnya sertipikat ganda secara garis besar bisa terjadi atau disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dimana terdapat kesalahan administrasi dari pihak Kantor Pertanahan dalam pengumpulan dan pengolahan data fisik atau karena faktor eksternal yaitu adanya kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dari pihak pemohon karena pemohon menunjukkan batas pemilikan yang salah.. Terhadap permasalahan sertipikat ganda ini, bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon dimulai dengan melakukan mediasi, namun apabila tidak mendapat titik temu para pihak bisa mengajukan gugatan di Pengadilan.

Untuk mengatasi permasalahan sertipikat ganda ini bukanlah hal yang mudah, karena ada kendala yang ditemukan salah satunya Kementerian ATR/BPN sejak tahun 1997, telah berusaha mengatasi permasalahan tersebut melalui kegiatan yang dinamakan *Graphical Index Mapping (GIM)*, namun upaya tersebut dirasa belum optimal, karena berbagai kendala seperti belum tersedianya Peta Dasar, kurangnya sumber daya manusia dan lain-lain. Namun dengan berkembangnya teknologi, kini kendala tersebut sudah mulai dapat diatasi. Selain dari sisi teknologi, salah satu upaya yang dilakukan adalah pendekatan kepada warga masyarakat salah satunya dengan memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat, mengenai pentingnya pendaftaran tanah, bagaimana proses permohonan sertipikat yang benar dan sanksi hukum terhadap seseorang yang dengan sengaja menunjukkan alas hak yang tidak benar sehingga menyebabkan terbitnya sertipikat ganda.

Kata Kunci : Sengketa; Sertipikat Ganda.

ABSTRACT

The birth of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA) has brought significant changes in the Indonesian land world. The UUPA and a set of implementing regulations are expected to provide legal guarantees for holders of land rights. However, in reality the land cannot be separated from problems, one of which occurred in Cirebon District, namely the emergence of a double certificate which resulted in a dispute.

The purpose of writing this thesis is to explain how the process of the occurrence of double certificates in the area of the Cirebon District Land Office, how to resolve disputes over the ownership of dual certificates in the Cirebon District Land Office and how the constraints and efforts made by the Cirebon District Land Office to overcome the double certificate.

The author conducts research using the method of sociological juridical approach that is combining legal literary materials such as books, legislation, and others to obtain secondary data which is then linked to facts obtained in the field through interviews to obtain primary data.

From this research, the answer was obtained that the emergence of a double certificate is generally caused by 2 factors, namely internal factors where there were administrative errors in the Land Office in collecting and processing physical data or due to external factors, namely the existence of intentional or unintentional errors from the applicant because the applicant shows the wrong ownership limit. With regard to this double certificate issue, the form of dispute resolution by the Cirebon Regency National Land Agency starts by conducting mediation, but if it does not get a meeting point the parties can file a lawsuit in the Court.

To overcome this double certificate problem is not easy, because there are obstacles that have been found, one of which is the Ministry of ATR / BPN since 1997, has tried to overcome these problems through an activity called Graphical Index Mapping (GIM), but the effort is felt to be not yet optimal, due to various obstacles such as the unavailability of the Basic Map, lack of human resources and others. But with the development of technology, now these obstacles have begun to be overcome. Aside from the technology side, one of the efforts taken is the approach to the community members, one of which is by providing counseling to the community, about the importance of land registration, how to process the application for a correct certificate and legal sanctions against someone who intentionally shows the basis of improper rights so causing the issuance of a double certificate

Keywords : Dispute; Double Certificate